

JAKARTA, 28 OKTOBER 2020



RILIS SURVEI & DISKUSI MEDIA; **Kinerja Kementerian/lembaga, Peluang Reshuffle Kabinet dan Potensi Capres 2024**

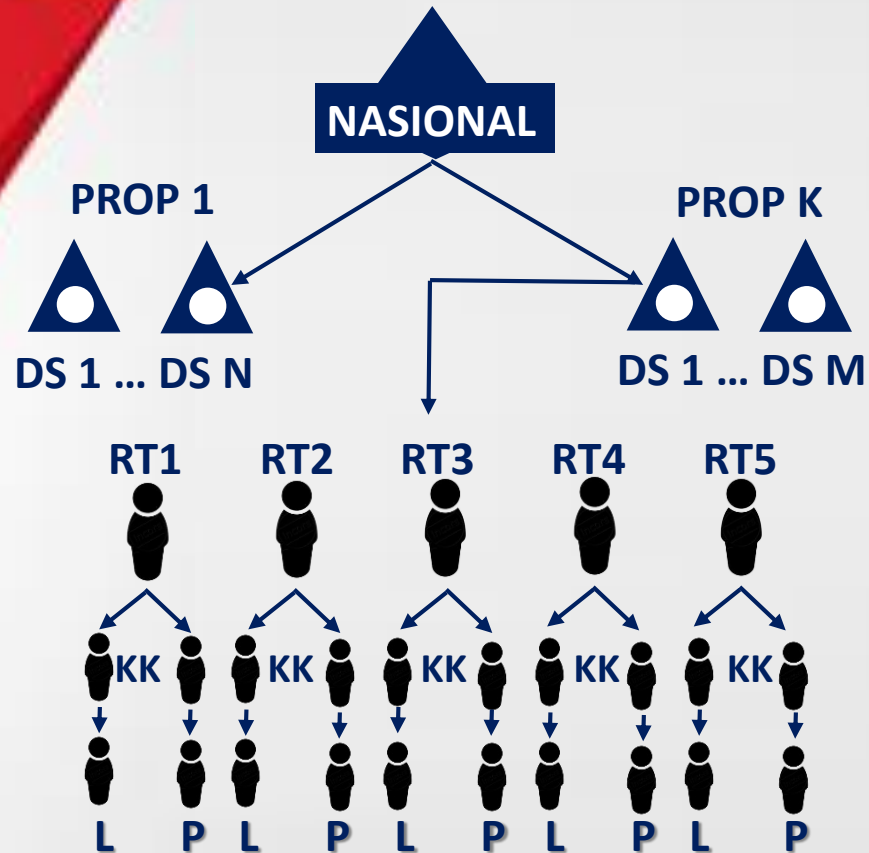


Latar Urgensi

Sejauh mana penilaian publik atas kinerja mengemuka Pemerintah selama kurun waktu satu tahun pertama?

Pertanyaan dasar ini memiliki uraian sekurangnya tiga hal; **1.** Mengukur persepsi publik atas kinerja pemerintah terkait isu-isu krusial dan berdampak pada publik., **2.** Mengukur loyalitas publik terhadap kebijakan pemerintah beserta implementasinya, **3.** Mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam melayani publik diberbagai sektor berdampak pada publik.





Metoda Survei

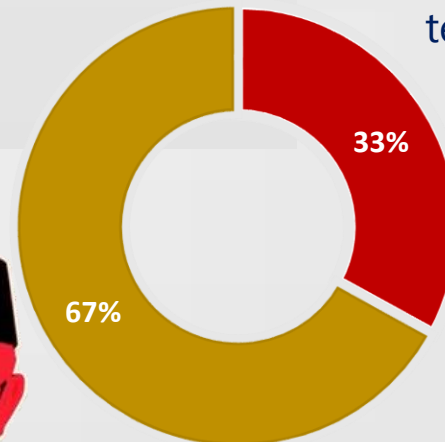
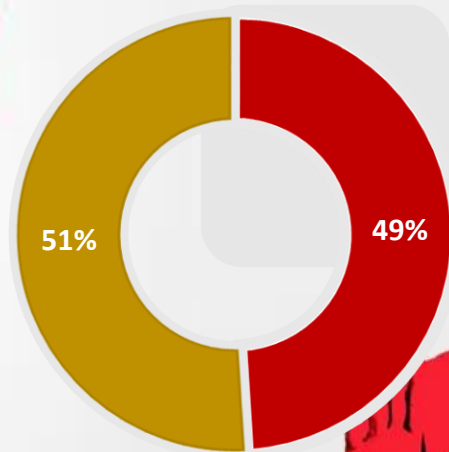
Purposive dan Multistage Random

Metode purposive sampling dilakukan terhadap 170 orang pemuka pendapat (*opinion leader*) yang berasal dari peneliti Universitas, lembaga penelitian mandiri, dan asosiasi ilmuwan sosial/perguruan tinggi. Sementara survei terhadap massa pemilih nasional dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1200 responden di seluruh Indonesia dengan *margin of error* dalam rentang 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

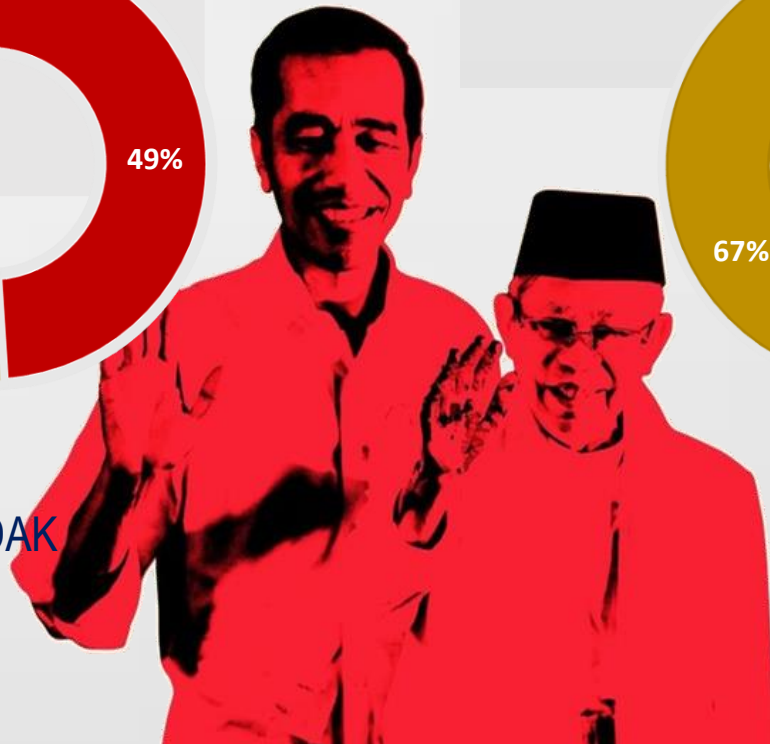
Periode survei 12-23 Oktober 2020



Kepuasan atas kinerja Presiden dan Wakil Presiden



■ PUAS ■ TIDAK



Persepsi kepuasan pada Presiden dan Wapres terjadi penurunan dibanding periode survey 8-20 Juni 2020, dari 63% menjadi 49%. Sementara kepuasan pada Wapres Maruf Amin dari 39% menjadi 33%.

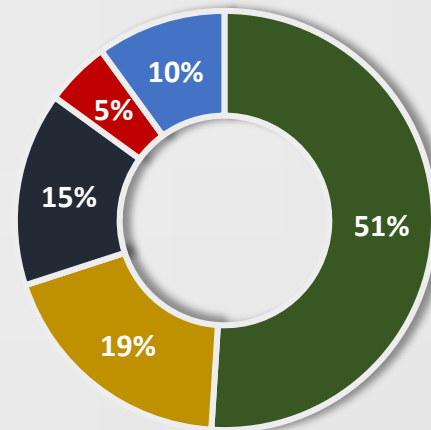
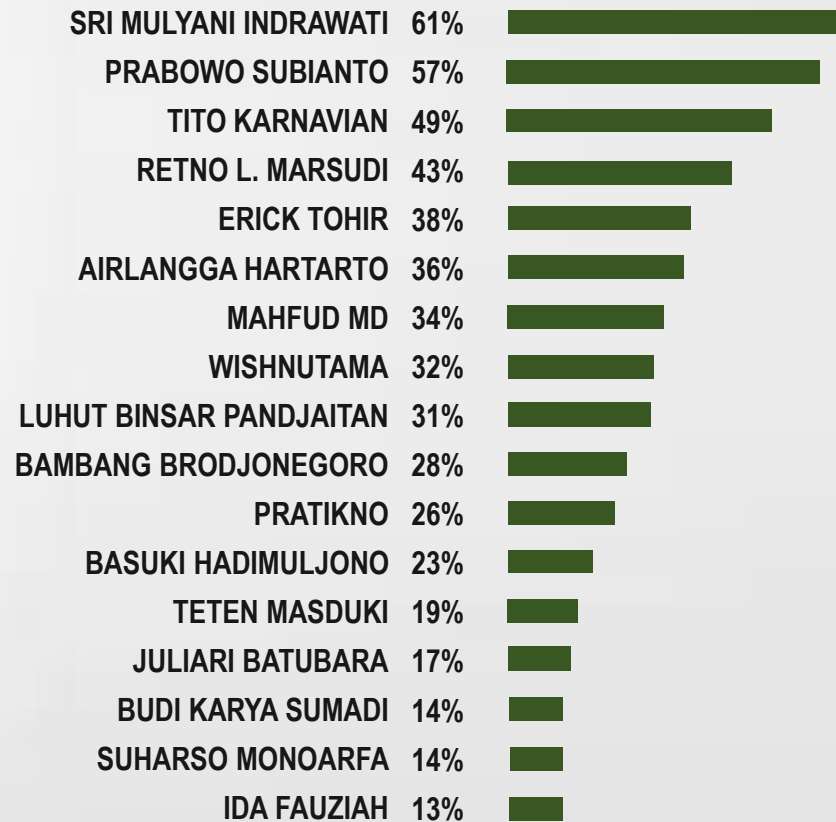
FAKTOR PENILAIAN MELIPUTI;



Kepuasan atas kinerja Menteri

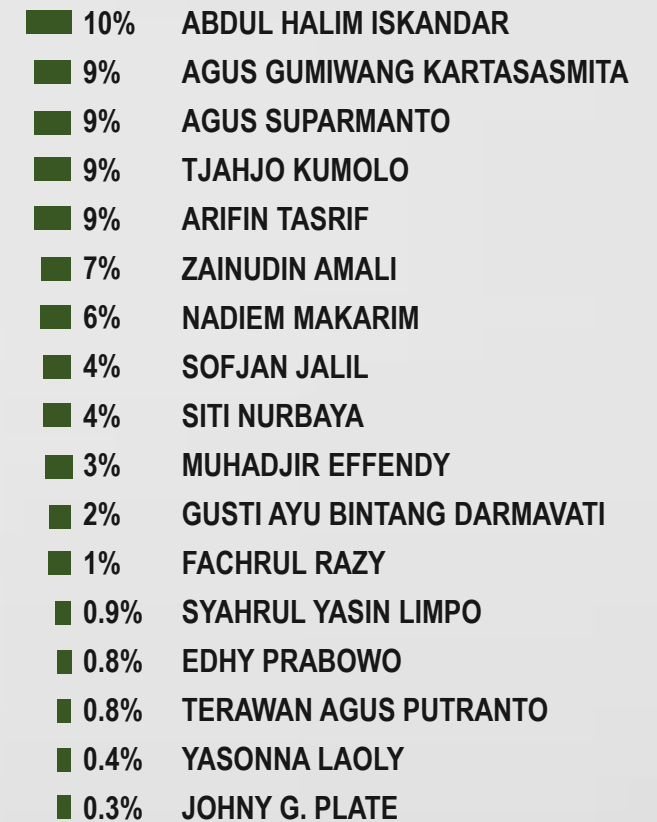
Penilaian publik terhadap anggota kabinet

Indonesia maju dari sisi kinerja ketokohan.



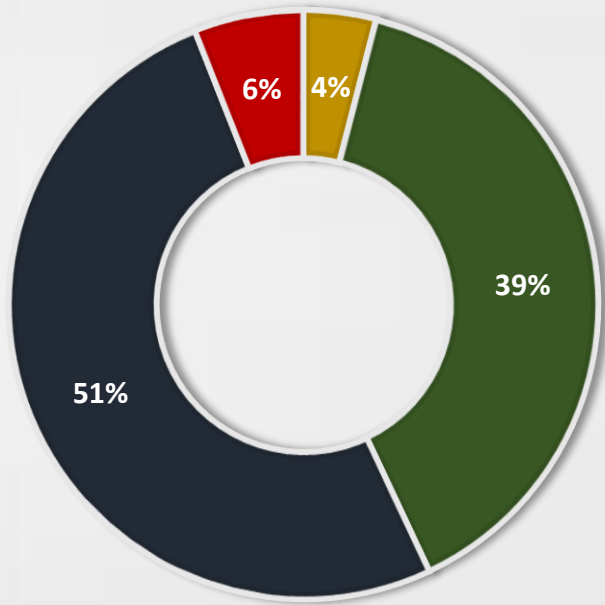
FAKTOR PERSEPSI

- KEBIJAKAN
- PROGRAM SOSIAL
- KOORDINASI ANTAR LEMBAGA
- TRANSPARANSI
- FAKTOR LAIN



Persepsi pada kepuasan Sektor Ekonomi

Penilaian publik terhadap kondisi ekonomi Nasional.



PERSEPSI

- SANGAT BAIK
- BAIK
- BURUK
- SANGAT BURUK

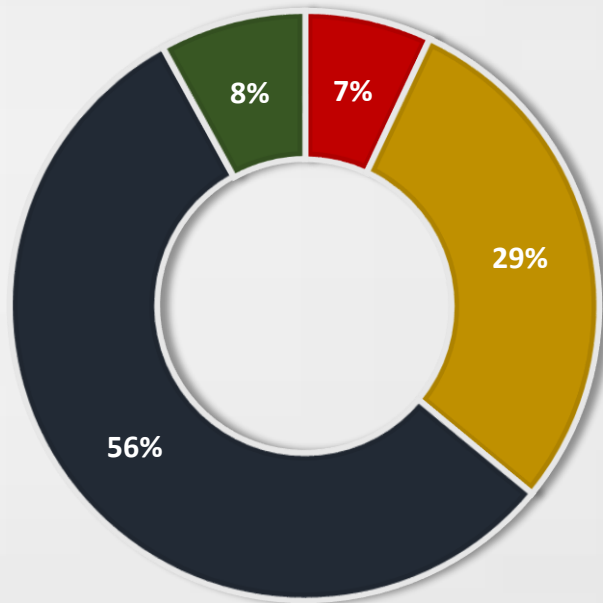
Penilaian publik atas kinerja pemerintah di sektor ekonomi cukup menegaskan ketidakpuasan, hal ini terlihat dari akumulasi respon buruk (51%) dan sangat buruk (6%) mencapai **57 persen**. Sementara respon positif hanya mampu menyerap **43 persen**.

Data empiris ini dipengaruhi beberapa hal; di antaranya persepsi mahal nya harga bahan pokok (58%), sulitnya mencari pekerjaan (44%), sulitnya melakukan transaksi perdagangan/jual beli (38%) dan hal lain-lain (34%).



Persepsi pada kepuasan Sektor Penegakan Hukum

Penilaian publik terhadap kepuasan atas penegakan hukum di Indonesia.



PERSEPSI

- SANGAT BAIK
- BAIK
- BURUK
- SANGAT BURUK

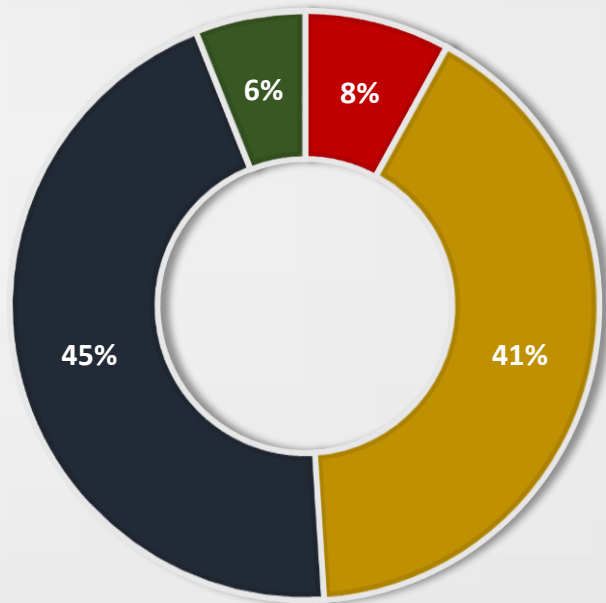
Ketidakpuasan publik atas kinerja pemerintah di sektor hukum menjadi yang tertinggi dibanding dengan sektor lainnya, angka ketidakpuasan mencapai **64 persen**, sementara persepsi positif hanya di **36 persen**.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian publik, adalah; Pemberantasan Korupsi (62%), independensi penegak hukum (56%), kebebasan berpendapat (52%), kualitas kebijakan (48%), dan hal lain-lain (36%).



Persepsi pada kepuasan Sektor Politik dan keamanan

Penilaian publik terhadap kepuasan atas kondisi politik dan keamanan.



PERSEPSI

- SANGAT BAIK
- BAIK
- BURUK
- SANGAT BURUK

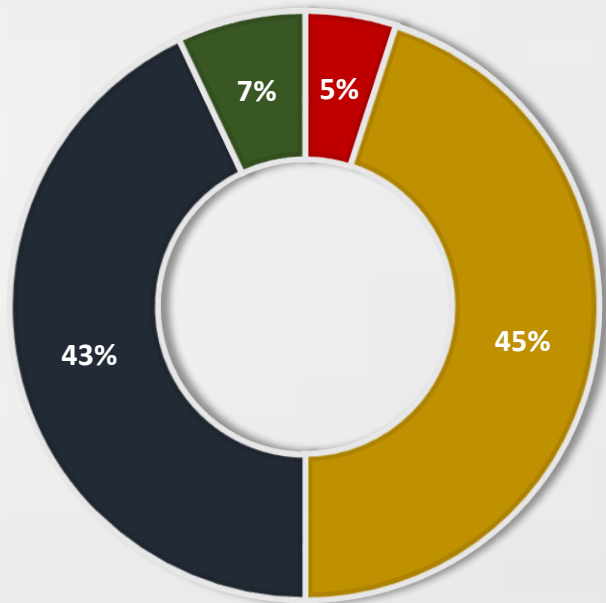
Persepsi publik pada bidang Politik dan keamanan cenderung berimbang, meskipun angka tertinggi berada di ketidakpuasan publik, sebesar **51 persen**. Sementara persepsi positif berada di angka **49 persen**.

Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi publik terkait kondisi Politik dan keamanan, adalah: kebebasan berpendapat (49%), kriminalitas (45%), perasaan aman (41%), ketertiban umum (36%), dan hal lainnya (31%).



Persepsi pada kepuasan Sektor Sosial dan Humaniora

Penilaian publik terhadap kepuasan atas kondisi sosial dan humaniora. Penilaian ini mencakup iklim demokrasi.



PERSEPSI

- SANGAT BAIK
- BAIK
- BURUK
- SANGAT BURUK

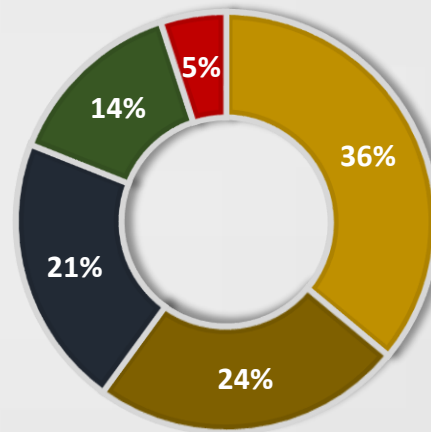
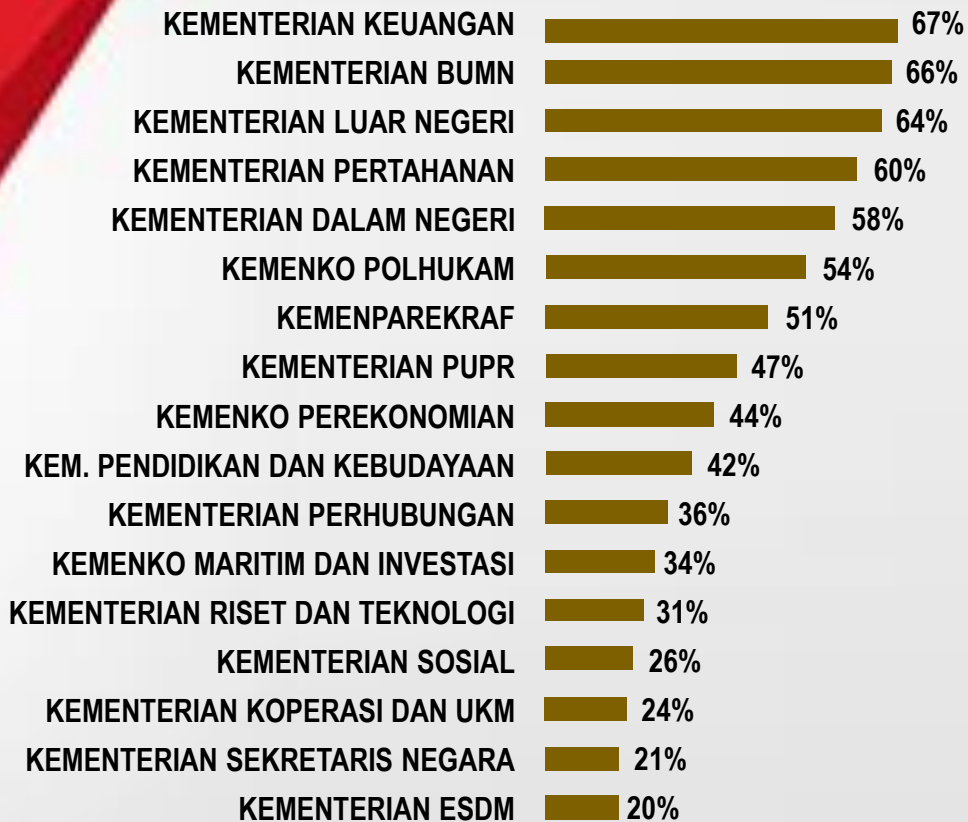
Persepsi publik pada bidang Sosial dan Humaniora berbagi angka sebagaimana bidang politik dan keamanan, ketidakpuasan publik tercatat sebesar **50 persen**.

Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi publik terkait kondisi Sosial, Politik dan Humaniora, adalah: Pengelolaan toleransi (51%), konflik sosial (46%), kesejahteraan (45), keadilan (38%), dan hal lainnya (27%).

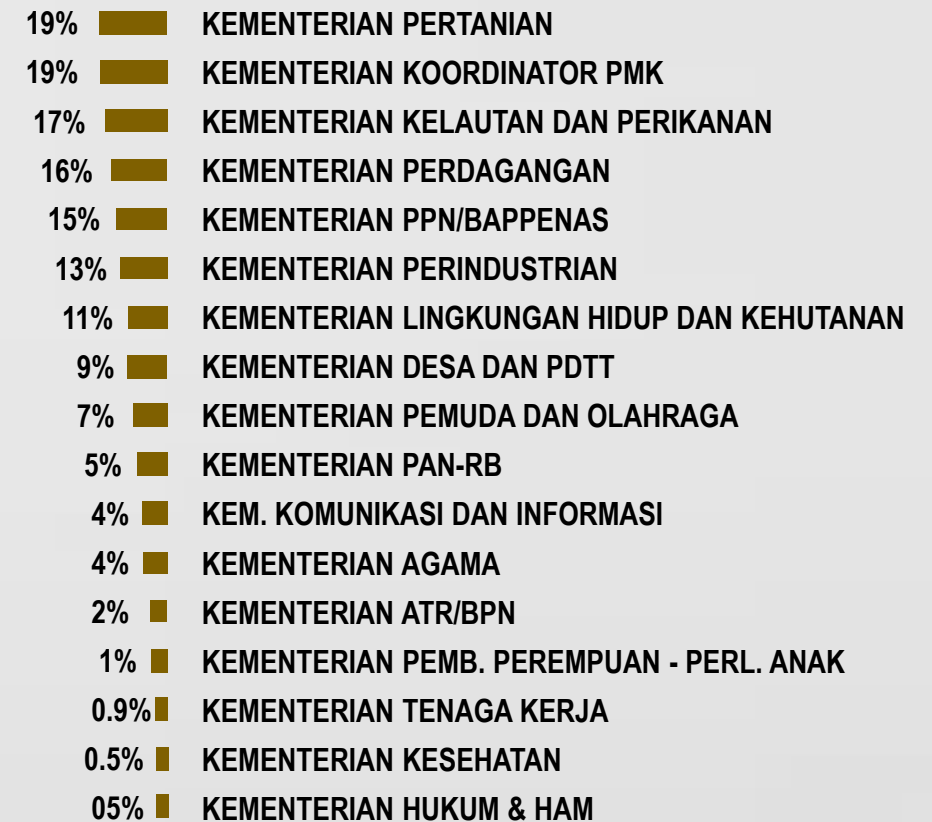


Persepsi publik atas kinerja kementerian

Penilaian publik dalam waktu satu tahun ini, kementerian mana yang dianggap berkinerja baik

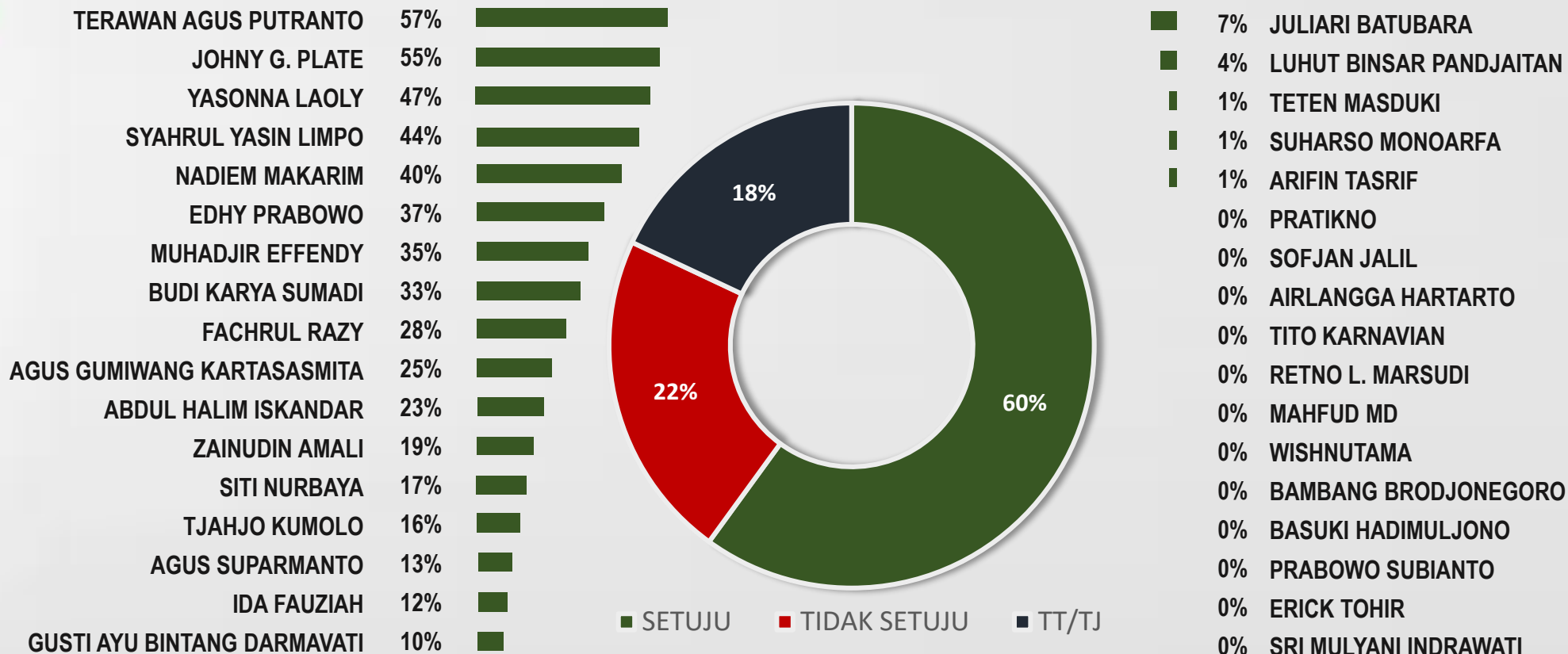


FAKTOR PERSEPSI



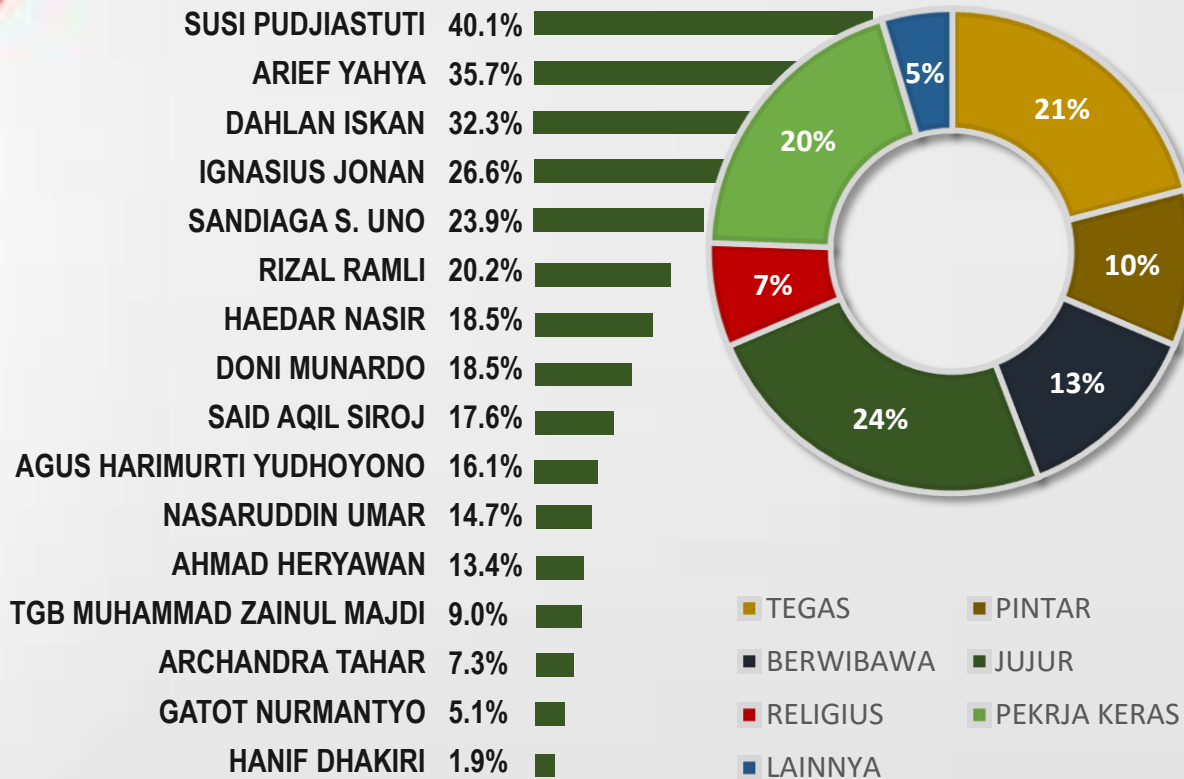
Persepsi publik terhadap wacana reshuffle

Penilaian publik terhadap anggota kabinet Indonesia maju yang paling diharapkan untuk diganti.



Persepsi publik pada tokoh potensial pengganti Reshuffle

Penilaian responden terhadap tokoh pengganti Menteri pada Kabinet Indonesia Maju.

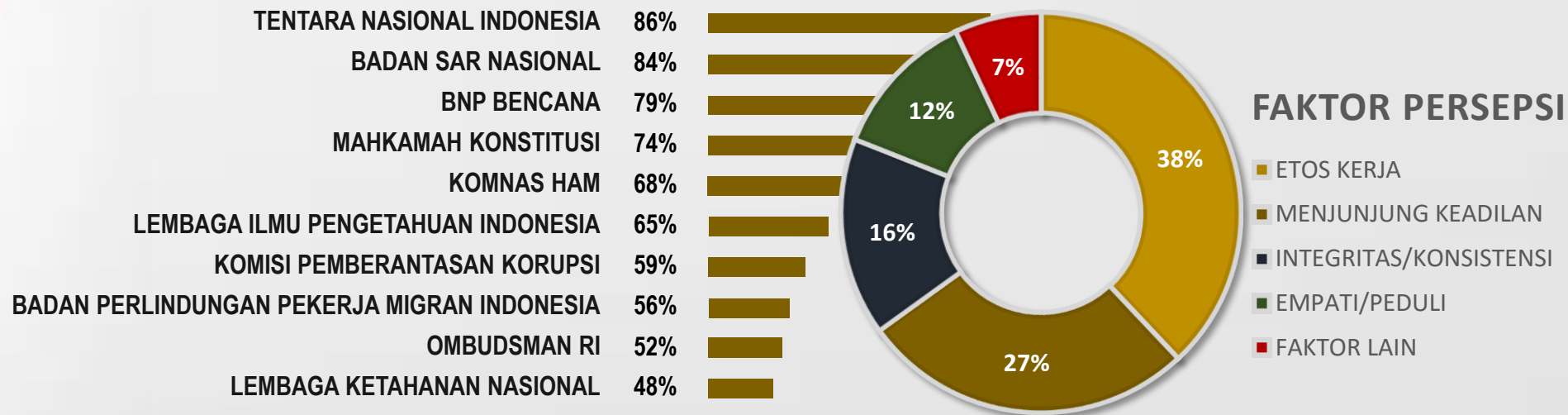


Daftar nama yang mendapat respon publik terkait potensi masuk dalam kabinet Indonesia Maju didominasi nama-nama populer dan senior. Adapun tokoh lain yang mendapat respon di bawah 1 persen di antaranya; Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Ahmad Hanafi Rais, Yenni Wahid, Fahri Hamzah, Grace Natalie.



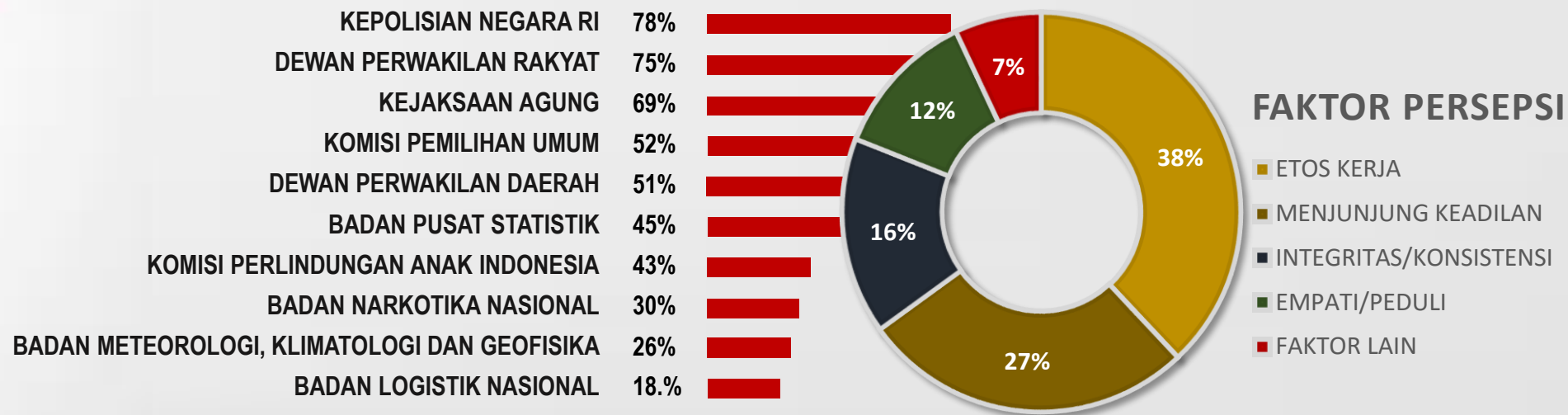
Persepsi publik atas kinerja badan/ lembaga negara

Penilaian publik dalam waktu satu tahun ini, 10 badan/ lembaga negara --selain Presiden RI-- mana yang dianggap berkinerja baik



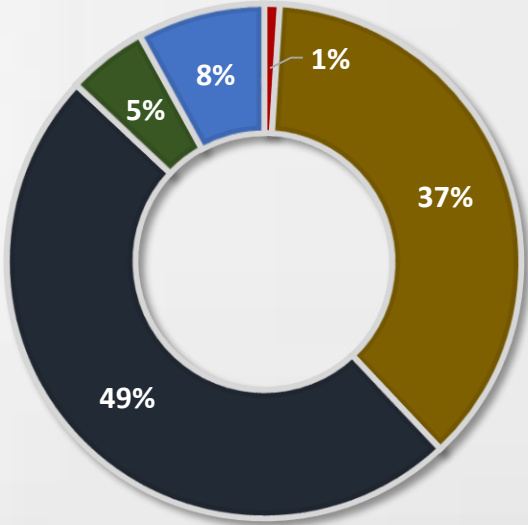
Persepsi publik atas kinerja badan/ lembaga negara

Penilaian publik dalam waktu satu tahun ini, 10 badan/ lembaga negara --selain Presiden RI-- mana yang dianggap berkinerja buruk.



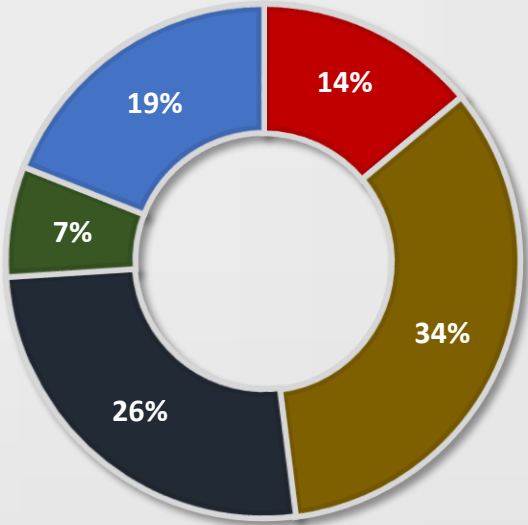
Persepsi publik atas isu-isu populer

Penilaian publik atas kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid19



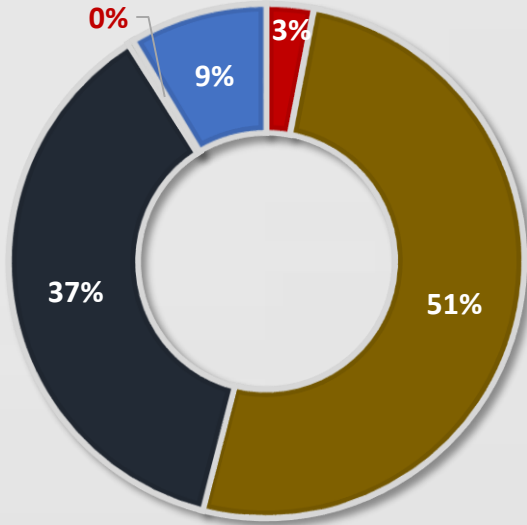
- SANGAT BAIK
- BAIK
- BURUK
- SANGAT BURUK
- TT/TJ

Penilaian publik atas kinerja pemerintah terkait program Kartu Prakerja



- SANGAT BAIK
- BAIK
- BURUK
- SANGAT BURUK
- TT/TJ

Penilaian publik atas kinerja pemerintah terkait program Bantuan sosial/Presiden



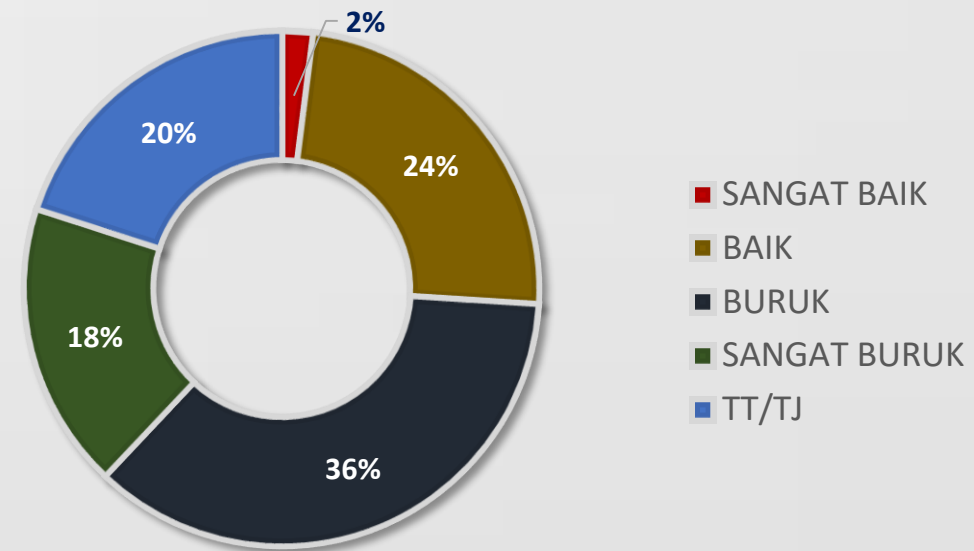
- SANGAT BAIK
- BAIK
- BURUK
- SANGAT BURUK (0.4)
- TT/TJ (8.6)



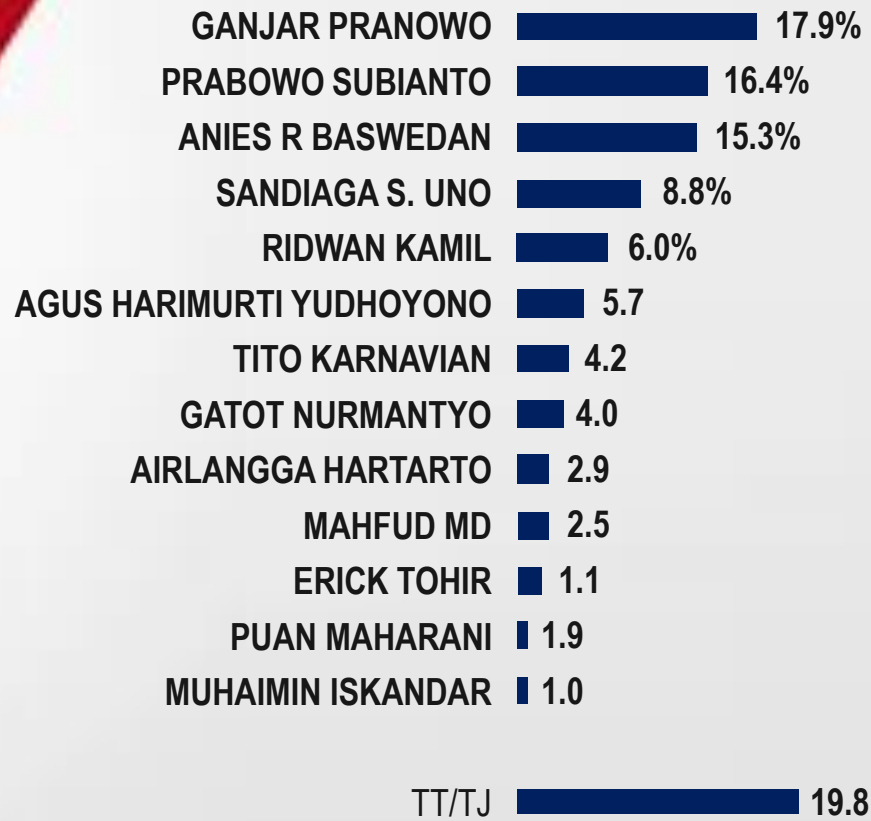
Persepsi publik atas isu-isu populer

Penilaian publik atas kinerja Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

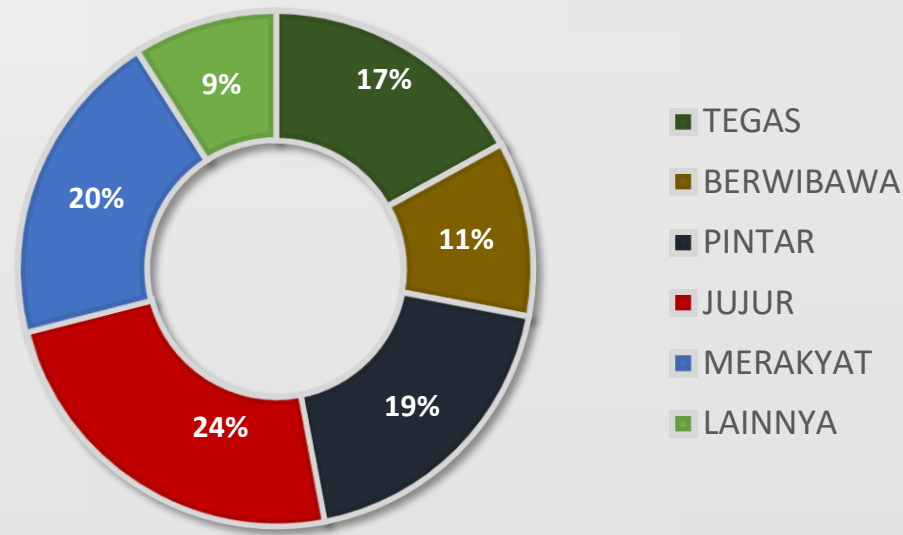
Respon publik terkait performa pemberantasan korupsi, di pengaruhi beberapa hal, antaranya; UU KPK baru berpengaruh pada buruknya upaya pemberantasan korupsi (63%), komposisi pimpinan KPK (58%), Presiden (52%), Kejaksaan Agung (46%), Polisi (44%), DPR RI (41%), dan faktor lainnya (21%)



Persepsi publik atas konstelasi politik nasional



Keputusan publik jika dilaksanakan Pemilihan Presiden, tokoh mana yang akan dipilih.





terimakasih

INDONESIA
POLITICAL OPINION

Jl. Tebet Raya, No. 2D Jakarta Selatan
Ph. 082110434281 | www.ipo.or.id

